

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KECAMATAN UNGARAN

*Asep Mulyana<sup>\*)</sup>*

Berdasarkan bukti-bukti permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi dari proses implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Ungaran tersebut maka penulis berasumsi bahwa Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) kurang efektif. Penulis memprediksikan bahwa yang menyebabkan kurang efektifnya Implementasi Program P2KP tersebut adalah berkaitan dengan organisasi pelaksana program dan kualitas manajemen program. Berdasarkan hasil output SPSS bahwa terdapat hubungan yang kuat (0,702) dan positif antara komunikasi dan implementasi program P2KP. Terdapat hubungan yang cukup kuat dan positif terjadi antara kemampuan organisasi dan implementasi program P2KP. Dan terdapat hubungan yang cukup kuat dan positif antara pengawasan program dan implementasi program P2KP. Sedangkan hubungan antara ketiga variabel bebas (Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan) dengan implementasi program P2KP (Y) didapatkan hasil bahwa hubungan yang kuat dan positif antara variabel bebas (Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan) dan variabel terikatnya yaitu implementasi program P2KP.

*Kata Kunci : Implementasi, Program, Pengentasan, Kemiskinan*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah publik yang sering menjadi ajang perdebatan atau pembicaraan oleh kaum intelektual maupun masyarakat biasa. Di samping itu, kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multi dimensional, mencakup politik, sosial ekonomi aset dan lain-lain. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder. Penduduk miskin tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya, tidak saja karena tidak memiliki asset sebagai sumber pendapatan, melainkan juga karena struktur sosial budaya dan sosial politik tidak membuka peluang bagi orang miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah *pengokohan kelembagaan masyarakat*. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri, berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik

---

<sup>\*)</sup> PNS, Kantor Kelurahan Wujil, Kecamatan Ungaran, Jateng

dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Penguatan organisasi masyarakat yang dimaksud juga dititikberatkan pada upaya pengokohan perannya sebagai motor penggerak dalam 'melembagakan' dan 'membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktifitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat di kelurahan mereka, sehingga diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam pemukiman yang lebih responsif dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengentaskan kemiskinan diperlukan suatu kebijakan, komitmen, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat.

Atas dasar inilah maka pemerintah mengeluarkan apa yang disebut dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi masyarakat (kelembagaan) yang dibangun oleh dan untuk masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri maupun rebug warga, baik dalam bentuk kredit mikro (dana bergulir) maupun hibah untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana dan prasarana dasar perumahan dan pemukiman.

Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) merupakan suatu program yang dirancang dengan suatu paradigma baru bahwa untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan diperlukan suatu pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan oleh komunitas itu sendiri. Sasaran utama Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) adalah masyarakat miskin perkotaan yang telah lama miskin dan penghasilannya merosot, akibat inflasi serta kehilangan sumber nafkah dikarenakan krisis ekonomi.

Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) telah berjalan sejak 19 Desember 1999 (tahap I) yang mana dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa P2KP belum berhasil, hal ini dibuktikan dengan permasalahan yang ada diantaranya : 1) kurang matangnya perencanaan dan koordinasi dalam semua tingkatan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan sehingga berdampak terhadap implementasi P2KP; 2) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada dalam KSM contoh : masih sulit dalam pembuatan proposal anggaran dan prioritas kegiatan. Hal ini berdampak pada kapasitas organisasi tersebut yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan; 3) keterbatasan dana yang disediakan, sehingga masih banyak yang membutuhkan; serta 4) adanya kredit macet dari KSM dengan berbagai alasan antara lain belum memperoleh laba yang memadai, sehingga dana yang akan digunakan untuk mengangsur dipakai lagi untuk modal atau usaha dagang (*Laporan Pelaksanaan P2KP I, 2001:14*)

Atas dasar pengalaman P2KP Tahap Pertama maka pemerintah melalui P2KP Tahap Kedua mencoba melakukan penyempurnaan yang mampu mendorong

dan melembagakan peran masyarakat lokal dengan menekan partisipasi dan manajemen masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Kabupaten Semarang, adalah daerah yang letak geografisnya sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali. Pengembangan usaha produktif di Kecamatan Ungaran dimanfaatkan untuk pemberian modal usaha yaitu diantaranya bakulan, mie ayam, mie bakso, makanan ringan dan lain-lain serta simpan pinjam. Sedangkan untuk pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin di perkotaan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, sirtu, aspal, jalan beton, jembatan dan lain-lain.

Berdasarkan fenomena yang ada di lapangan, P2KP sebagai program pembangunan kadang kala tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, sehingga implementasi kurang mengena dan kurang efektif. Hal ini dibuktikan antara lain: 1) Keterlambatan pekerjaan fisik karena kurangnya dana, sesuai rencana; 2) Dana usaha produktif banyak mengalami kendala dalam hal angsuran, karena kurangnya kesadaran masyarakat dan juga disebabkan adanya pengaruh program lain yang serupa yang mengalami kegagalan dalam angsuran dan tidak ada tindak lanjut yang jelas; 3) Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal menggali ide-ide, perencanaan kebutuhan di wilayah masing-masing, karena masing menganggap bahwa program P2KP sebagai program yang ada sebelumnya yaitu PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P3DT dan lain-lain. Kegiatan usaha ekonomi masyarakat belum maksimal, terbukti dengan partisipasi masyarakat dalam menepati pelunasan masih terlambat.

Berdasarkan fenomena permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi dari proses implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Ungaran tersebut maka penulis berasumsi bahwa Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) kurang efektif. Penulis memprediksikan bahwa yang menyebabkan kurang efektifnya Implementasi Program P2KP tersebut adalah berkaitan dengan organisasi pelaksana program dan kualitas manajemen program. Kondisi demikian membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Ungaran.

Rumusan masalah sebagai berikut :1) Apakah ada hubungan positif dan signifikan antara kurangnya komunikasi dengan kurang efektifnya Implementasi program Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)?; 2) Apakah ada hubungan positif dan signifikan antara rendahnya kemampuan organisasi/ kelembagaan dengan kurang efektifnya implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)?; serta 3) Apakah ada hubungan positif dan signifikan antara kurangnya pengawasan dengan kurang efektifnya implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)?

## **METODA PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang yang memperoleh bantuan dana dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

### **2. Definisi Konseptual dan operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep yang digunakan oleh peneliti, maka akan dikemukakan definisi konsep yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu variabel Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah sebagai berikut :

- a) Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)  
Adalah serangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan/program itu diputuskan yaitu melalui langkah-langkah operasional atau proses melakukan kegiatan untuk mewujudkan tujuan kebijakan/ program yang telah ditetapkan. Indikatornya adalah sebagai berikut :
  - 1) Proses
    - a) Penyediaan dana untuk modal kegiatan usaha produktif dan pengembangan prasarana dan sarana
      - Tingkat kesesuaian penggunaan dana P2KP
      - Tingkat kecukupan dana untuk kegiatan P2KP
    - b) Penyediaan prasarana dan sarana pengembangan ekonomi
      - Tingkat kesesuaian pembangunan/pengembangan prasarana desa
      - Tingkat kesesuaian pengadaan sarana
      - Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana
  - 2) Tujuan
    - a) Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin perkotaan dalam kegiatan ekonomi.
      - Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggali ide-ide
      - Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebutuhan
      - Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
      - Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian program
    - b) Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat miskin di perkotaan
      - Tingkat perkembangan kegiatan ekonomi
    - c) Meningkatkan kemampuan kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
      - Tingkat pengalaman lembaga dalam melaksanakan program
    - d) Memberikan pinjaman dana kepada masyarakat miskin yang sifatnya bergulir maupun hibah
      - Tingkat kecukupan dana P2KP yang digunakan untuk dana bergulir atau hibah
- b) Komunikasi  
Adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari pimpinan (tingkat yang lebih tinggi) kepada bawahan (tingkat yang lebih rendah), dari bawahan (tingkat yang lebih rendah) kepada atasan (tingkat yang lebih tinggi).

Dari individu yang satu ke individu yang sama tingkat otoritasnya melalui media komunikasi tertentu. Indikatornya adalah sebagai berikut :

- 1) *Downward Communication* atau komunikasi kepada bawahan (tingkat yang lebih rendah)
    - Frekuensi sosialisasi P2KP ke desa-desa
    - Tingkat kejelasan informasi yang disampaikan melalui sosialisasi program
    - Tingkat ketepatan penggunaan media komunikasi
  - 2) *Upward communication* atau komunikasi kepada atasan (tingkat yang lebih tinggi)
    - Tingkat keseringan dalam memberikan ide-ide, saran dan masukan
    - Tingkat penerimaan saran dan masukan
    - Tingkat ketepatan penggunaan media komunikasi
  - 3) *Horizontal Communication* atau komunikasi horisontal (tingkat yang sama)
    - Tingkat keseringan berkomunikasi antar KSM se-Kelurahan
    - Tingkat respon antar KSM dalam berkomunikasi
    - Tingkat keseringan berkomunikasi berkaitan dengan koordinasi,tugas,pemecahan masalah antar KSM antar kelurahan yang menerima program
- c) Kemampuan Organisasi
- Adalah kapasitas organisasi yang meliputi staf/pegawai, wewenang, dana, fasilitas, ketrampilan, kecakapan dan pengalaman untuk mengerjakan tugas dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan suatu kebijakan program. Indikatornya adalah sebagai berikut :
- 1) Staf/pegawai
    - Tingkat kecukupan jumlah aparat pelaksana / BKM untuk mengelola P2KP
  - 2) Wewenang
    - Tingkat keseringan pemberian wewenang
    - Tingkat tanggung jawab yang diemban oleh BKM
  - 3) Dana
    - Tingkat kecukupan dana untuk insentif/gaji para anggota BKM
    - Tingkat kejelasan sumber dana untuk operasional BKM dalam program P2KP
    - Tingkat kejelasan pengeluaran operasional P2KP
  - 4) Fasilitas
    - Tingkat kecukupan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan P2KP
    - Tingkat ketepatan penggunaan dan pemanfaatan fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaan P2KP
  - 5) Ketrampilan
    - Tingkat ketrampilan menggunakan peralatan yang ada untuk melaksanakan P2KP
    - Tingkat keseringan BKM mengikuti prosedur yang berlaku dalam mengelola program
    - Tingkat ketrampilan dalam melakukan hubungan baik antara BKM dan KSM

- 6) Kecakapan
  - Tingkat keseringan memberikan masukan-masukan demi kelancaran pelaksanaan tugas
  - Tingkat antisipasi munculnya masalah
  - Tingkat kecepatan dalam mengatasi masalah yang muncul
- 7) Pengalaman
  - Tingkat keseringan melaksanakan program sejenis P2KP
  - Tingkat kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan yang sama/sejenis
- d) Pengawasan
 

Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan (tingkat yang lebih tinggi) untuk mengamati dan menilai bawahan (tingkat yang lebih rendah) terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dimulai dari penentuan standar, pengukuran hasil kerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan atau korektif bila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat kesalahan dan penyimpangan yang kesemuanya ini diarahkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi atau suatu program pembangunan. Indikatornya adalah sebagai berikut :

  - 1) Penetapan standar
    - Tingkat kecukupan peraturan-peraturan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan
    - Tingkat kejelasan tata aturan dalam pelaksanaan pekerjaan
    - Tingkat kesesuaian kondisi riil masyarakat dengan standar yang telah ditetapkan
  - 2) Pengukuran hasil kerja
    - Tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana
    - Tingkat kesesuaian antara rencana dengan standar yang telah ditetapkan
    - Tingkat kesesuaian antara hasil kerja dengan standar kerja yang ada
  - 3) Pelaksanaan tindakan perbaikan atau korektif
    - Tingkat kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan
    - Tingkat kecepatan dalam memecahkan masalah yang muncul
    - Tingkat intensitas pemberian teguran atas kesalahan
    - Tingkat intensitas melakukan tindakan perbaikan
  - 4) Pelaksanaan tindakan pelaporan rutin dan ketepatan waktu angsuran
    - Tingkat ketepatan waktu laporan rutin kepada tingkat atas
    - Tingkat ketepatan waktu angsuran

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder sebagai bahan pengolahan penelitian, yakni : Data Primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat serta data sekunder berupa dokumen-dokumen P2KP, laporan perkembangan dari konsultan P2KP di tingkat propinsi maupun di tingkat Kabupaten dan Badan Perencanaan Pembangunan daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten

#### 4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh anggota KSM di masing-masing Kelurahan di Kecamatan Ungaran, yang mana pengambilan sampelnya menggunakan tehnik Three Stages Sampling. Dimana sample diambil dari anggota KSM yang berjumlah 64 orang, di 3 (tiga) kelurahan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan langsung di obyek penelitian yaitu di desa-desa, guna mengumpulkan data primer. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik :

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung di obyek penelitian untuk melakukan pencatatan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pengarah.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan data pelengkap dari data primer. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen, laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP.

#### 6. Teknik Analisa Data

##### a. Analisa kualitatif

Analisa kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa postulat maupun pendapat-pendapat responden yang bukan berupa data statistik. Hasil analisa kualitatif ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai pendukung hasil analisa kuantitatif.

##### b. Analisa kuantitatif

Analisa kuantitatif dilakukan terhadap data yang berupa data statistik untuk mencari tingkat korelasi antar variabel dengan menggunakan rumus-rumus statistik sebagai berikut :

##### 1) Koefisien Korelasi Rank-Kendall

Metode ini digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam metode ini diharuskan membuat rangking terlebih dahulu secara teratur pada satu macam pengamatan tertentu kemudian menyesuaikan rangking yang telah tersusun tersebut dengan pasangannya yang telah ada (Samsubar Saleh, 1986:105). Derajat keeratan hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah antara variabel bebas (X1) dengan variabel terikat (Y), antara variabel bebas (X2) dengan variabel terikat (Y), antara variabel bebas (X3) dengan variabel terikat (Y). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$T = \frac{S}{1/2 N (N - 1)}$$

Keterangan :

T = Koefisien korelasi Rank-Kendall

N = Jumlah pasangan observasi

S = Selisih antara nilai positif dan negatif terhadap masing-masing ranking yang diberikan

Rumus tersebut diatas digunakan jika dalam skor variabel tidak terbatas pada skor sama. tetapi jika dalam penelitian ini telah terjadi penjumlahan skor antar individu dalam satu variabel menghasilkan skor yang sama besar, maka harus digunakan suatu faktor korelasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$T_{xy} = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - T_x} \sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - T_y}}$$

Keterangan :

T = Koefisien korelasi Rank Kendall

S = Jumlah observasi skor-skor +1 dan -1 untuk semua pasangan

N = Jumlah individu dalam sampel

T<sub>x</sub> = Faktor korelasi, yang menunjukkan jumlah berbagai harga T untuk semua kelompok yang berlainan yang mempunyai observasi berangka sama pada X.

T<sub>y</sub> = Faktor korelasi, yang menunjukkan jumlah berbagai harga T semua kelompok yang berlainan yang mempunyai observasi berangka sama pada Y.

Karena dalam penelitian menggunakan sampel besar yaitu lebih dari 10, maka untuk menguji signifikansi T hitung maka harus diuji dengan rumus :

$$Z = \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N+1)}}}$$

Keterangan :

Z = Hasil uji T hitung yang akan konsultasikan

T = Koefisien korelasi Rank Kendall

N = Jumlah individu dalam sampel

Dengan taraf signifikansi 0,05 ini kemudian dikonsultasikan dengan harga kritis Z pada tabel nilai Z untuk mengetahui nilai signifikansinya. Jika  $Z_{hitung} \geq Z_{tabel}$  pada taraf 0,05 berarti signifikan, hipotesis diterima. Jika  $Z_{hitung} < Z_{tabel}$  pada taraf 0,05 berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak.

## 2) Koefisien Konkordansi Rank Kendall

Yaitu untuk menguji hipotesis mayor yang diajukan. Dalam hal ini adalah menghitung korelasi antara keempat variabel dalam penelitian ini yakni Komunikasi, Kemampuan Organisasi, Pengawasan dan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Rumus statistiknya adalah sebagai berikut:

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2} K (N - N) - K E T}$$

Keterangan :

- W = Jumlah konkordansi Kendall
- S = Jumlah kuadrat deviasi observasi dari Mean Rj
- K = Banyaknya himpunan rangking penjenjangan
- N = Banyaknya obyek atau individu yang beri rangking
- T = Faktor korelasi rangking yang berangka sama
- K = Banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh angka sama untuk suatu rangking tertentu.
- E = Jumlah semua kelompok angka sama dalam masing-masing ranking

Uji signifikansi :

$$X^2 = K (N - 1) W$$

Jika  $X^2_{hitung} \geq t_{0,05}$  berarti signifikan, dan hipotesis diterima.

Jika  $X^2_{hitung} < t_{0,05}$  berarti tidak signifikan, dan hipotesis ditolak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan menyebarkan angket kepada 64 responden yang merupakan warga yang menerima bantuan dana P2KP di Kecamatan Ungaran, maka dapat hasil penelitian sebagai berikut.

Sebagian besar responden pada penelitian ini merupakan responden yang golongan umurnya sudah berkeluarga (usia dewasa) diantaranya yang berumur antara 41 – 50 tahun, rata-rata perempuan, dengan status responden yaitu sudah menikah, dengan pendidikan akhir mereka rata-rata tamat SMP dan bermata pencaharian sebagai pedagang.

Penilaian sebagian besar responden dalam hal implementasi program P2KP di Kecamatan Ungaran adalah sangat baik yaitu sebanyak 24 orang (37,5%), responden yang menilai baik sebanyak 30 orang (46,87%), responden yang menilai kurang baik sebanyak 8 orang (12,50%) dan sisanya adalah responden yang menilai tidak baik sebanyak 2 orang (3,13%). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ungaran telah berjalan dengan baik berdasarkan indikator-indikator yang telah diajukan kepada responden yang merupakan penerima bantuan program tersebut.

Penilaian sebagian besar responden dalam hal komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan program P2KP ( $X_1$ ) di Kecamatan Ungaran adalah sangat sering yaitu sebanyak 19 orang (29,69%), responden yang menilai sering sebanyak 30 orang (46,87%), responden yang menilai jarang sebanyak 11 orang (17,19%) dan sisanya adalah responden yang menilai tidak pernah sebanyak 4 orang (6,25%). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan program P2KP di Kecamatan Ungaran telah dijalin dengan frekuensi berkomunikasi antara pengelola dan BKM tergolong cukup dilakukan berdasarkan indikator-indikator yang telah diajukan kepada responden.

Penilaian sebagian besar responden menilai dalam hal Kemampuan Organisasi dalam melaksanakan program P2KP ( $X_2$ ) di Kecamatan Ungaran adalah sangat baik yaitu sebanyak 20 orang (31,25%), responden yang menilai baik sebanyak 34 orang (53,125%), dan sisanya adalah responden yang menilai buruk sebanyak 10 orang (15,625%). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Kemampuan Organisasi dalam melaksanakan program P2KP di Kecamatan Ungaran telah terselenggara dengan baik atas kerjasama antara BKM selaku pengelola program dan KSM selaku pelaksana program berdasarkan indikator-indikator yang telah diajukan kepada responden.

Penilaian sebagian besar responden (penerima program bantuan P2KP) menilai dalam hal Pengawasan Program P2KP ( $X_3$ ) di Kecamatan Ungaran adalah sangat baik yaitu sebanyak 22 orang (34,38%), responden yang menilai baik sebanyak 33 orang (51,56%), dan sisanya adalah responden yang menilai buruk sebanyak 9 orang (14,06%). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengawasan Program P2KP di Kecamatan Ungaran telah terselenggara dengan baik berdasarkan indikator-indikator yang telah diajukan kepada responden.

Berdasarkan hasil output SPSS bahwa terdapat hubungan yang kuat (0,702) dan positif antara komunikasi ( $X_1$ ) dan implementasi program P2KP (Y). Nilai yang positif ini mengindikasikan bahwa jika komunikasi berlangsung dengan baik antar komponen-komponen yang terkait di dalamnya baik komunikasi vertikal maupun komunikasi horisontal yang terjadi antara KSM, BKM, maupun pemerintah, maka implementasi program akan berjalan dengan baik. Dan sebaliknya jika komunikasi berlangsung dengan kurang baik dan kurang harmonis antar komponen-komponen yang terkait di dalamnya baik komunikasi vertikal maupun komunikasi horisontal yang terjadi antara KSM, BKM, maupun pemerintah, maka implementasi program akan berjalan tidak sebagaimana yang diharapkan.

Terdapat hubungan yang cukup kuat (0,657) dan positif antara kemampuan organisasi ( $X_2$ ) dan implementasi program P2KP (Y). Nilai yang positif ini mengindikasikan bahwa jika kemampuan organisasi yang ada terkait dengan pelaksanaan program berjalan dengan baik, maka implementasi program akan berjalan dengan baik. Dan sebaliknya jika kemampuan organisasi yang ada terkait dengan pelaksanaan program berjalan dengan tidak baik, maka implementasi program akan berjalan tidak sebagaimana yang diharapkan.

Terjadi hubungan yang cukup kuat (0,685) dan positif antara pengawasan program ( $X_3$ ) dan implementasi program P2KP (Y). Nilai yang positif ini mengindikasikan bahwa jika pengawasan program P2KP dilaksanakan dengan rutin, maka implementasi program akan berjalan dengan baik. Dan sebaliknya jika pengawasan program P2KP tidak dilaksanakan, maka implementasi program akan berjalan tidak sebagaimana yang diharapkan.

Untuk menguji hubungan antara ketiga variabel bebas (Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan) dan variabel terikatnya yaitu implementasi program P2KP (Y) dimana pengujian termasuk kategori uji statistik non parametrik, maka untuk menguji hubungan antara lebih dari 2 variabel menggunakan uji konkordansi W- Kendal. Berdasarkan hasil output SPSS didapatkan hasil bahwa hubungan yang kuat (0,847) dan positif antara variabel bebas (Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan) dan variabel terikatnya yaitu implementasi program P2KP (Y). Nilai yang positif ini mengindikasikan bahwa jika ketiga variabel

bebas (Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan) dilaksanakan dengan rutin, maka implementasi program juga akan berjalan dengan baik. Dan sebaliknya jika Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan tidak dijalankan dengan baik, maka implementasi program akan berjalan tidak sebagaimana yang diharapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan menyebarkan angket kepada 64 responden yang merupakan warga yang menerima bantuan dana P2KP di Kecamatan Ungaran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penilaian sebagian besar responden dalam hal implementasi program P2KP di Kecamatan Ungaran telah berjalan dengan baik berdasarkan indikator-indikator yang telah diajukan kepada responden yang merupakan penerima bantuan program tersebut.
2. Penilaian sebagian besar responden dalam hal jalinan komunikasi dalam pelaksanaan program P2KP ( $X_1$ ) di Kecamatan Ungaran telah dijalin dengan frekuensi berkomunikasi antara pengelola dan BKM tergolong cukup sering dilakukan berdasarkan indikator-indikator yang telah diajukan kepada responden.
3. Penilaian sebagian besar responden menilai dalam hal Kemampuan Organisasi dalam melaksanakan program P2KP ( $X_2$ ) di Kecamatan Ungaran adalah telah terselenggara dengan baik atas kerjasama antara BKM selaku pengelola program dan KSM selaku pelaksana program berdasarkan indikator-indikator yang telah diajukan kepada responden.
4. Penilaian sebagian besar responden (penerima program bantuan P2KP) menilai dalam hal Pengawasan Program P2KP ( $X_3$ ) di Kecamatan Ungaran adalah telah terselenggara dengan baik berdasarkan indikator-indikator yang telah diajukan kepada responden.
5. Hubungan antar variabel didapatkan hasil sebagai berikut :
  - Terdapat hubungan yang kuat dan positif antara komunikasi ( $X_1$ ) dan implementasi program P2KP (Y).
  - Terdapat hubungan yang cukup kuat dan positif antara kemampuan organisasi ( $X_2$ ) dan implementasi program P2KP (Y).
  - Terjadi hubungan yang cukup kuat dan positif antara pengawasan program ( $X_3$ ) dan implementasi program P2KP (Y).
6. Berdasarkan hasil output SPSS didapatkan hasil bahwa hubungan yang kuat dan positif antara variabel bebas (Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan) dan variabel terikatnya yaitu implementasi program P2KP (Y).

Adapun saran-saran yang dapat diajukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi yang terjalin atas pelaksanaan program P2KP di Kecamatan Ungaran telah efektif, oleh sebab itu perlu kiranya upaya untuk mempertahankan situasi demikian ini dengan tetap memilih orang-orang yang tepat untuk menyampaikan dan menerima informasi agar informasi itu akurat baik, dapat dipercaya dan benar-benar melakukan program P2KP yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan dalam hal pemukiman warga perkotaan.

2. Kemampuan Organisasi dalam tahap implementasi program P2KP di Kecamatan Ungaran diperoleh hasil dimana kemampuan organisasi yang mendukung program P2KP ini telah dilaksanakan dengan baik melalui upaya-upaya pelaksanaan yang telah ditetapkan dan dibebankan kepada penerima program yaitu KSM untuk menjalankan program P2KP dengan baik. Upaya mempertahankan dan bila perlu meningkatkan kemampuan organisasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan program agar tercapai sesuai tujuan yang ditetapkan yaitu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya masalah permukiman masyarakat di perkotaan.
3. Sedangkan dalam hal pengawasan program P2KP di Kecamatan Ungaran didapatkan hasil yang signifikan dan positif antara pengawasan program dengan implementasi program P2KP. Pengawasan program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ungaran tergolong sudah berjalan dengan baik dan efisien, obyektif dan menghasilkan fakta, serta telah berpedoman pada kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu efisiensi pelaksanaan P2KP dapat tercapai dengan tetap melakukan pengawasan yang rutin dan baik dari para pengelolanya, baik BKM maupun pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Abdullah, M. Syukur, 1988, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*, Fakultas Sosial and Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Ujung Pandang.
2. Agung Ridlo, Ir.Mohammad, 2001, *Kemiskinan di Perkotaan*, Unissula Press, Semarang
3. Bardach, Eugene, 1979, *The Implementation game: What Happens After a Bill Becomes a Law*, The MIT Press, Massachusetts and London, Cambridge
4. Cheema G, Shabbir, 1983, *Administration of Regional and Local Development*, Nagoya, Jepang
5. Dunn, William N, 1992, *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
6. Eaton, Joseph W, 1986, *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional*, Terjemahan: Pandam Guritno dan Aldi Jeni, Universitas Indonesia Press, Jakarta
7. Edwards III, George C, 1986, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington
8. Gibson, Ivancevich, Donnelly, 2001, *Organization*, 8 Ed, Bina rupa Aksara, Jakarta
9. Grindle, Meriless S (Ed), 1980, *Politics and Policy Implementation in the third World*, Princeton University Press, New Jersey.
10. Gie, The Liang, 1979, *Unsur-unsur Administrasi*, Suatu Kumpulan Karangan, Karya Kencana, Yogyakarta.
11. Hesselbein, Gold Smith, Bechard, 1997, *The Organization of the Future*, Gramedia, Jakarta
12. Handoko, T. Hani, 1986, *Manajemen*, YPFE UGM, Yogyakarta
13. Hasan, Ir.M.Iqbal, MM, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
14. Indrawijaya, Adam I, 1989, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru, Bandung
15. Islamy, Irfan, 1986, *Analisis Implementasi Kebijakan*, Bima Aksara, Jakarta

16. Jones, Charles O, 1981, *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs
17. \_\_\_\_\_, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, terjemahan Nashir Budiman (Ed), Rajawali Press, Jakarta
18. Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Cetakan Pertama, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
19. Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung.
20. Koentjoroningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
21. Manullang, M, 1982, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yudhistira, Jakarta
22. Muhammad, Arni, 2001, *Komunikasi Organisasi*, Gramedia, Jakarta
23. Mustopadja dan Tjokroamidjojo, Bintoro, 1985, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
24. Nazir, 1983, *Metodologi Penelitian Sosial*, Gramedia, Jakarta.
25. Pressman, Jeffrey L. & aaron Wildavsky, *Implementation*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London
26. Triatmodjo, Sudiby, 2000, *Sistem Pengawasan*, Lembaga Administrasi Negara.
- Ramli, Rusli, 1984, *Asas-Asas Manajemen*, Modul UT, Karunia, Jakarta.
27. Salusu, 2000, *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Cetakan Ketiga, Grasindo, Jakarta.
28. Siagian, Sondang P, 1996, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara. Jakarta.
29. \_\_\_\_\_, 1988, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta
30. Swastha, Basu, 1984, *Asas-Asas Manajemen Modern*, Liberty.
31. Soenarko SD, 2000, *Kebijakan Pemerintah*, Cetakan Kedua, Airlangga University Utama Press, Bandung.
32. Supriatna, Tjahya, 1997, *Birokrasi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan*, Humanior Utama Press, Bandung.
33. Tjokroamidjojo, Bintoro, 1988, *Pengawasan Melekat sebagai Fungsi Manajemen*, Jakarta.
34. \_\_\_\_\_, 1989, *Perencanaan Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta.
35. Robbins, Stephen P, 1996, *Perilaku organisasi, Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Prenhallindo, Jakarta.
36. Quade. E.S, 1984, *Analisis for Public Decision*, Elsevier Science Publishing, New York
37. Wahab, Solichin Abdul, 2001, *Analisis Kebijakan*, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
38. Wibawa, Samodra, 1992, *Beberapa Konsep untuk Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
39. Winardi. 1986, *Asas-Asas Manajemen*, Alumni, Bandung
40. Bappenas, 1997, *Media Informasi, Profesi, dan Komunikasi Perencanaan Pembangunan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
41. Pedoman Umum, 2002, *Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*, Dirjen Perumahan dan Pemukiman, Jakarta.
42. Pedoman Teknis, 2002, *Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*, Dirjen Perumahan dan Pemukiman, Jakarta.